

P-ISSN: 2722 - 7138 E-ISSN: 2722 - 7154	JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY (Journal of Social Science Education) Available online : https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy	Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2025 Halaman: 110 - 120
--	--	--

Tinjauan Aspek Afektif dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Nurlatifa^{1*}, Lianda Dewi Sartika²

^{1,2}Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

¹nurlatifa@staff.unram.ac.id, ²liandadewi@staff.unram.ac.id

Diterima: 22-07-2025.; Direvisi: 07-09-2025; Disetujui: 10-10-2025

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v6i2.11521>

Abstrak: Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan warga negara yang berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial bermasyarakat sehingga salah satu kompetensi yang harus dicapai yaitu aspek afektif (sikap). Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pendidik mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengajaran dan evaluasi aspek kognitif dan psikomotorik saja tetapi juga merancang pembelajaran dan evaluasi aspek afektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia hanya berfokus pada ranah kognitif dan seringkali ranah penilaian aspek afektif terabaikan. Pendidik dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan berdasarkan taksonomi domain afektif sehingga aspek sikap dalam pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai. Taksonomi domain afektif terdiri dari menerima, menanggapi, menghargai, pengorganisian, dan karakterisasi berdasarkan nilai atau kumpulan nilai.

Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan; aspek afektif; taksonomi, domain afektif

Abstract: Civic education aims to create citizens who play an active role in various aspects of social life, so one of the competencies that must be achieved is the affective aspect (attitude). This research is important so that civic education teachers do not only focus on teaching and evaluating cognitive and psychomotor aspects but also design learning and evaluation of affective aspects. This study uses a qualitative research method with a literature review data collection technique. The data is then analyzed using qualitative data analysis techniques with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that so far, planning, implementation, and assessment in civic education in Indonesia have only focused on the cognitive domain, while the affective domain has been neglected. Educators can design and implement the learning process in civic education based on the affective domain taxonomy so that the attitude aspect in civic education can be achieved. The affective domain taxonomy consists of receiving, responding, valuing, organizing, and characterizing based on values or sets of values.

Keywords: citizenship education; affective aspects; affective domain, taxonomy

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia diterapkan melalui Pendidikan Pancasila. Nomenklatur Pendidikan Pancasila mulai digunakan di Indonesia sejak diterapkannya Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Meskipun dalam penamaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila tidak lagi tercantum Pendidikan Kewarganegaraan, namun dalam muatan isi dan pelaksanaannya Pendidikan Kewarganegaraan dimuat dalam Pendidikan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan secara luas diartikan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai kaum muda untuk memiliki peran dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik (Kerr, 2002). Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan warga negara yang baik berdasarkan nilai-nilai karakter pancasila sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SK BSKAP 033/H/KR/2022). Tujuan ini tentunya menjadikan pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan kaum muda di masa depan.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan mampu menciptakan pendidikan kewarganegaraan demokratis yang aktif. Pendidikan kewarganegaraan demokratis yang aktif tidak hanya membekali peserta didik dengan aspek kognitif, tetapi peserta didik juga dibekali dengan aspek psikomotorik dan aspek afektif (Tusriyanto & Karsiwan, 2021). Aspek afektif dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup nilai, sikap, dan disposisi (Print & Lange, 2012). Berbeda dengan Kurikulum 2013 sebelumnya di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara eksplisit memuat empat kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan saat ini, muatan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka khususnya pada aspek afektif, hanya diuraikan secara umum pada masing-masing elemen capaian pembelajaran di setiap fase.

Selanjutnya diberikan keleluasaan kepada pendidik untuk merancang, melaksanakan dan menilainya saat proses pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dari setiap elemen. Selain itu, dalam Kurikulum Merdeka saat ini, aspek afektif dapat dicapai melalui pelaksanaan Poyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 (Saputra et al., 2022). P5 dalam Kurikulum Merdeka merupakan kegiatan kokurikuler yang dalam proses pelaksanaannya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan dapat mengembangkan dan memperkuat karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya (Yuniarto et al., 2022).

Aspek afektif dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan indikator penting yang menunjukkan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sikap dan partisipasi aktif seorang warga negara dapat mencerminkan kualitas mereka sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, aspek afektif harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik oleh para pendidik sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan kewarganegaraan. Selayaknya aspek pengetahuan (kognitif), aspek afektif juga memiliki taksonomi tersendiri yang dikenal dengan taksonomi domain afektif yang dikembangkan oleh Krathwohl. Taksonomi domain afektif oleh Krathwohl terdiri dari receiving (menerima), responding (menanggapi), valuing (menghargai), organizing (pengorganisasian), dan characterization by value or value-set (karakterisasi berdasarkan nilai atau kumpulan nilai) (Krathwohl et al., 1964).

Pada pelaksanaannya di dunia pendidikan, aspek afektif memiliki kesulitan tersendiri untuk diimplementasikan karena dianggap sebagai ranah pribadi yang dimiliki oleh individu dan sulit untuk dinilai sikap tersebut benar dimiliki oleh peserta didik atau hanya yang ditampilkan saat proses belajar mengajar. Sehingga sampai saat ini upaya yang sistematis untuk mengukur ranah afektif bisa dikatakan tidak dilakukan oleh pendidik sebagaimana pada ranah kognitif (Krathwohl et al., 1964).

Pada kenyataannya, implementasi proses pembelajaran dalam capaian aspek afektif pada Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sampai saat ini masih sangat minim. Tahap yang harus menjadi perhatian di dunia pendidikan Indonesia yaitu terkait dengan kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan pendidikan yang paling penting salah satunya yaitu rancangan kurikulum. Pada rancangan kurikulum khususnya dalam Pendidikan Pancasila harus dirancang dengan baik seperti apa aspek afektif dalam pembelajaran bisa terlaksana dan tercapai. Sampai saat ini pendidik dalam setiap proses pembelajaran lebih menekankan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian aspek pengetahuan sehingga seringkali aspek afektif diabaikan (Agustin et al., 2017; Hasanah et al., 2020).

Pendidik tidak melakukan perencanaan pada modul ajar seperti apa aspek afektif yang hendak dicapai oleh peserta didik dalam setiap fase. Pada proses pelaksanaannya, pendidik hanya melakukan observasi atau mengamati secara langsung sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik di dalam kelas yang pada akhirnya akan dinilai dengan menggunakan skala likert. Aspek sikap yang dinilai pada buku guru cenderung general berkaitan dengan kedisiplinan, kesopanan, tanggung jawab, sopan santun, dan kejujuran sedangkan aspek afektif yang harus dimiliki oleh peserta didik berkaitan dengan capaian materi pembelajaran di setiap fase tidak tercapai.

Pentingnya pelaksanaan dan penilaian aspek afektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sejalan dengan penelitian oleh Marniati (2018) yang menunjukkan bahwa penilaian aspek afektif yang dilakukan oleh pendidik dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum sesuai dengan standar dan ketentuan dalam penilaian aspek afektif peserta didik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik kurang mampu dalam mengembangkan instrument yang akan digunakan untuk penilaian aspek efektif dan pendidik beranggapan bahwa penilaian aspek afektif peserta didik hanya sekedar dinilai melalui observasi baik atau buruk sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya terkait dengan tercapainya aspek afektif.

Selain itu, terdapat penelitian oleh Ramadhani & Shaleh (2024) yang menunjukkan hasil bahwa guru cenderung mengabaikan penilaian aspek afektif pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disebabkan karena sulitnya merumuskan indikator serta instrument dalam pelaksanaan dan penilaian aspek afektif. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar pendidik memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan taksonomi domain afektif sehingga pendidik dapat merumuskan indikator pencapaian pembelajaran oleh peserta didik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis melihat penting adanya tinjauan terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian aspek afektif dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penulis menggunakan teori taksonomi domain afektif yang dikembangkan oleh Krathwohl untuk menganalisis bagaimana seharusnya pelaksanaan capaian aspek afektif dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Tinjauan dalam penelitian ini mencakup teori dan konsep aspek afektif dalam pendidikan Kewarganegaraan, hasil pelaksanaan dan penilaian aspek afektif dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan bagaimana seharusnya perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian aspek afektif dilakukan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Peneliti menggunakan beberapa sumber buku primer yaitu berkaitan dengan taksonomi domain afektif (Krathwohl et al., 1964), teori dan prinsip pendidikan kewarganegaraan (Veugelers & Samsusi, 2023), etika kewarganegaraan dan penilaian pendidikan kewarganegaraan (Arthur & Cremin, 2012), pendidikan moral dalam pendidikan kewarganegaraan (Veugelers, 2024), pendidikan nilai, serta buku guru pendidikan Pancasila (Khoiriyarningsih et al., 2023; Setiawati et al., 2023; Suryatna et al., 2023). Peneliti juga memperoleh data penelitian dengan mengkaji literatur jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian aspek afektif pada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif (Miles et al., 2014). Dari berbagai sumber primer, peneliti mencoba mengumpulkan teori dan konsep aspek afektif dalam pendidikan kewarganegaraan. Teori dan konsep tersebut kemudian digunakan sebagai bahan menganalisis dan membahas pelaksanaan capaian aspek afektif pada pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia baik dari jurnal hasil penelitian terkait penilaian aspek afektif, buku guru Pendidikan Pancasila dan muatan aspek afektif dalam kurikulum merdeka. Pada penelitian ini, peneliti membatasi objek penelitian pada ranah afektif yang harus dicapai oleh peserta didik pada semua jenjang kelas di Sekolah Menengah Pertama atau Fase D (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022; Karsiwan, Wardani, et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Capaian pembelajaran aspek afektif pendidikan pancasila pada Kurikulum Merdeka berdasarkan empat elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari peserta didik melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran untuk mematuhi pentingnya norma dan aturan, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan praktik nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya dalam masyarakat global (Amboro et al., 2023) . Selain itu, peserta didik mampu menunjukkan perwujudan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila serta menunjukkan contoh serta praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi.

Satuan pendidikan juga merancang buku panduan bagi pendidik dalam rangka menunjang proses belajar mengajar pendidikan Pancasila di sekolah. Buku panduan bagi pendidik memuat isi terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Berdasarkan data yang diperoleh pada buku panduan untuk pendidik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 7, 8 dan 9, pendidik memulai proses pembelajaran dengan merancang modul ajar, berkaitan dengan aspek sikap (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022). Rancangan tersebut telah dicantumkan pada modul ajar

tetapi tidak dirancang dengan jelas tahapan yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam mencapai aspek afektif tersebut. Berbeda dengan aspek kognitif yang telah dirancang oleh guru sesuai dengan domain kognitif yang dimulai dari tahap mengingat hingga menciptakan. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran dan penilaian (asesmen). Pada tahap penilaian terdapat tiga jenis penilaian yaitu penilaian awal, penilaian formatif dan penilaian sumatif (Widiyani & Karsiwan, 2024). Penilaian awal dilaksanakan sebelum pendidik memulai proses pembelajaran, sedangkan penilaian formatif dilaksanakan saat proses pembelajaran dan penilaian sumatif dilaksanakan diakhir pembelajaran melalui tes tulis atau proyek kewarganegaraan (Khoiriyansih et al., 2023; Setiawati et al., 2023; Suryatna et al., 2023). Dari tiga jenis penilaian tersebut, tidak ada aspek afektif yang berkaitan dengan capaian pembelajaran.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terkait dengan penilaian aspek afektif pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, guru belum mampu melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang berkaitan dengan capaian aspek afektif. Penilaian aspek afektif hanya dilakukan berdasarkan perkiraan guru selama proses pembelajaran (Agustin et al., 2017). Penilaian afektif belum sepenuhnya terstruktur dan terorganisir dengan baik karena guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian sehingga penilaian aspek afektif hanya dilaksanakan seadanya (Riyanti et al., 2023). Penilaian aspek afektif hanya dianggap sebagai pelengkap pada laporan hasil belajar peserta didik, peserta didik yang mampu mengerjakan soal tetap mendapat nilai bagus meskipun dalam kesempatan lain peserta didik tersebut melakukan sikap yang bertentangan dengan nilai dan norma baik (Suyadi, 2004).

Pada kurikulum merdeka, ada upaya untuk mencapai aspek afektif peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui P5 berbasis proyek (Ratnawati & Karsiwan, 2024; Samsuri, 2021). P5 dilaksanakan secara terpisah dari kurikulum inti sehingga memiliki muatan konten dan waktu tersendiri di luar dari proses pembelajaran di dalam kelas.



Gambar 1. Dimensi Profil Pelajar Pancasila

Pada pelaksanaan P5 pendidik juga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penilaian. Program P5 yang seharusnya mampu mengembangkan karakter peserta didik namun pada pelaksanaannya hanya berfokus pada penilaian proyek atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik (Astuti1 et al., 2024). Guru lebih berfokus pada produk pembelajaran dan tidak berfokus pada dimensi, elemen dan sub elemen yang capaian akhirnya pada perkembangan ranah afektif peserta didik. Guru juga mengalami

kesulitan dalam Menyusun indikator perkembangan antar sub elemen dalam dimensi P5 (Adi et al., 2023). Hal ini sebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kemampuan pendidik dalam merumuskan atau merancang instrument penilaian aspek afektif peserta didik sehingga penilaian cenderung dilaksanakan melalui observasi langsung. Tujuan dari hadirnya P5 yaitu bagaimana peserta didik memiliki karakter Pancasila bukan hanya berfokus pada menghasilkan produk.

Pembahasan

Kebijakan pendidikan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan salah satunya melalui penerapan kurikulum Merdeka (Karsiwan, Wardani, et al., 2023). Pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka perlu untuk dianalisis khususnya terkait dengan rancangan pembelajaran pada aspek afektif. Pada kurikulum merdeka capaian pembelajaran yang diharapkan tidak lagi fokuskan pada masing-masing aspek seperti pada kurikulum 2012 yang secara rinci menjelaskan aspek yang harus dicapai pada ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada kurikulum merdeka ke tiga aspek tersebut hanya dijabarkan secara umum capaian pembelajaran yang ingin dicapai melalui empat elemen yaitu elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pendidik diberikan kebebasan untuk menentukan dan menjabarkan capaian dari masing-masing aspek yang ingin dicapai. Menurut peneliti dengan kebijakan kurikulum seperti ini akan menyebabkan semakin terabaikannya aspek afektif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pada saat masih diterapkannya Kurikulum 2013 dengan dijabarkannya secara rinci aspek afektif yang harus dicapai tetapi pada implementasinya di dalam kelas masih banyak pendidik yang tidak merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai aspek afektif ini dengan baik dan maksimal.

Kebijakan selanjutnya yang terdapat dalam kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan peningkatan aspek afektif ini yaitu adanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program ini bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022). Nilai-nilai yang mencerminkan profil pelajar Pancasila tercermin dalam struktur buku, terutama melalui aktivitas siswa. Penyusunan buku teks ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pusbuk Kemendikbudristek. Buku teks untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila disusun berdasarkan tiga komponen utama: muatan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip asesmen (Alanur et al., 2023). Pada pelaksanaannya kegiatan P5 ini hanya dijadikan sebagai proyek untuk menampilkan kearifan lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah, kegiatan kewirausahaan dan pementasan lainnya bahkan terdapat banyak sekolah yang belum mampu menerapkan kurikulum Merdeka ini. Fokus yang perlu diperhatikan oleh pembentuk kebijakan sistem kurikulum ini yaitu apakah semua pendidik telah memahami seperti apa dan bagaimana isi dan implementasi dari kurikulum Merdeka ini, kemudian yang perlu menjadi perhatian yaitu kegiatan P5 ini seharusnya tidak hanya sekedar menampilkan proyek tetapi merupakan proses pembelajaran yang utuh mulai dari proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Rancangan dan pelaksanaan penilaian ini harus juga memperhatikan aspek afektif yang menjadi tujuan utama dari program P5.

Aspek afektif bukan sebuah capaian yang bisa terlihat secara langsung dan dengan proses yang cepat pada diri peserta didik. Aspek afektif dapat dicapai tidak terlepas dari penanaman nilai, norma dan moral kepada diri peserta didik yang pada akhirnya

ditampilkan oleh peserta didik dalam bentuk karakter atau sikap dalam kehidupan sehari-hari (Anggraena, 2020). Nilai adalah penilaian gagasan yang baik dan yang buruk. Norma adalah hukum dasar dalam kehidupan sosial yang ada didasarkan atas nilai. Moral ada kecenderungan yang bertahan lama dan menjadi keyakinan bagi peserta didik akan kebaikan dan keburukan yang kemudian ditunjukkan dalam perilaku tertentu (Veugelers, 2024; Veugelers & Samsusi, 2023). Maka dari keterikatan tersebut, jelas kiranya nilai, norma dan moral merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi aspek sikap dari peserta didik. Proses pembelajaran di dalam kelas khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila harus menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengikuti dan mengembangkan nilai-nilai baik yang ada pada diri mereka sendiri yang kemudian melalui pembelajaran nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam bentuk keterampilan mereka untuk melakukan penalaran moral, tindakan moral, dan refleksi dari tindakan moral tersebut.

Mengembangkan nilai dan norma adalah dua elemen penting dalam pendidikan. Siswa berlatih mengembangkan norma ketika mereka perlu mencapai konsensus dengan orang lain. Proses ini dapat berlangsung baik di sekolah maupun dalam konteks yang lebih luas. Selama periode pembelajaran, penting bagi siswa untuk mendapatkan banyak kesempatan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, untuk saling berinteraksi dan mengembangkan norma bersama teman-teman, guru, dan sesama warga negara. Pengembangan norma bersifat dialogis dan bertujuan mencapai kesepakatan; meskipun kontradiksi mungkin muncul, tujuan utamanya adalah untuk mendengarkan pandangan semua pihak, menghargai perbedaan, serta menemukan cara untuk hidup berdampingan dan membangun masyarakat secara kolektif (Veugelers, 2024). Harapannya dengan memahami konsep dasar dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila terkait dengan nilai, norma, dan moral dapat meningkatkan capaian aspek afektif bagi peserta didik.

Aspek afektif dalam Pendidikan Pancasila juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembentukan karakter peserta didik terutama terkait dengan karakter peserta didik di lingkungan publik. Karakter publik mencakup rasa kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, ketaatan terhadap aturan, kemampuan berpikir kritis, keinginan untuk mendengarkan, serta keterampilan dalam bernegosiasi dan berkompromi dengan orang lain (Siadari, 2018). Pada aspek afektif terdapat berbagai capaian sikap sosial yang jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik oleh pendidik maka akan membentuk karakter publik peserta didik sehingga peserta didik memiliki rasa kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, ketaatan terhadap aturan yang berlaku, kemampuan berfikir kritis, keinginan peserta didik untuk mendengarkan, serta kemampuan dalam bernegosiasi dan berkompromi dengan orang lain. Dengan memahami konsep karakter, jelas bahwa pengembangan karakter adalah salah satu aspek terpenting yang harus dibentuk sejak usia dini. Keluarga menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter pertama anak, sementara pendidikan atau sekolah berperan sebagai lingkungan kedua yang membantu anak dalam proses pembentukan karakter melalui pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Kerr memiliki dua kontinum yaitu kontinum minimal dan maksimal. Kontinum minimal hanya terbatas pada transfer kognitif dari pendidik kepada peserta didik sedangkan kontinum maksimal sampai pada tahap pengembangan nilai, sikap dan tanggung jawab peserta didik yang sulit untuk diukur (Kerr, 2002). Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pendidik pendidikan Pancasila berdasarkan hasil belajar siswa yang selama ini hanya diukur sebatas tes tulis

yang menunjukkan hasil pengetahuan peserta didik tetapi belum sampai pada penilaian aspek sikap sehingga bisa dikatakan pendidikan Pancasila di Indonesia masih pada kontinum minimal. Deakin Crick berpendapat bahwa karena tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup pengembangan pribadi, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat, praktik penilaian harus bersifat formatif dan fokus pada proses pembelajaran itu sendiri, serta pada proses pengembangan pribadi (Arthur & Cremin, 2012).

Berdasarkan taksonomi domain efektif oleh Krathwohl penilaian aspek afektif dalam pendidikan pembelajaran dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Penerimaan (*receiving*)

Peserta didik memiliki kepekaan atau kesadaran untuk memperhatikan materi pembelajaran yang sedang disampaikan oleh pendidik. Misalnya capaian pembelajaran aspek afektif pada elemen pancasila yaitu “peserta didik melaksanakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari”, maka pada tahapan awal ini pendidik harus mampu menghadirkan kepekaan kepada peserta didik tentang materi nilai-nilai pancasila sehingga peserta didik dapat menerimanya dan memiliki rasa ingin tahu tentang materi yang sedang disampaikan (Shodiq, 2021; Widiyani & Karsiwan, 2024). Pada tahap ini pendidik menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik untuk menerima nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi Ideologi bangsa Indonesia setelah diterima oleh peserta didik maka akan menjadi nilai yang diyakini sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahap penerimaan ini menjadi dasar yang sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik sebelum mereka menerapkannya dalam kehidupan.

2. Partisipasi (*responding*)

Pada tahap ini, peserta didik berpartisipasi dengan ikut menanyakan, menyampaikan pendapatnya tentang materi yang dipelajari (Maslahah, W., Rofiah, L., & Makrifah, 2022). Materi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang begitu luas agar jangan sampai hanya sekedar menjadi konsep teori yang dihafal lalu hilang setelah proses pembelajaran. Maka salah satu taksonomi yang menjadi penilaian dalam aspek afektif bagaimana partisipasi peserta didik dalam menanyakan apa yang kurang atau belum dipahami dari materi yang sedang dibahas, selanjutnya peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait dengan materi yang sedang dipelajari.

3. Penilaian atau penentuan sikap

Pada tahap ini peserta didik memiliki kemampuan untuk menilai materi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apakah bisa ia terima atau nilai mana yang dapat ditolak. Kemampuan ini ditampakkan dalam bentuk pernyataan atau tindakan yang terlihat selama proses pembelajaran berlangsung (Karsiwan, Sari, et al., 2023). Maka pada tahap ini pendidik sudah dapat menilai domain afektif peserta didik melalui sikap dan tindakan yang dilakukan apakah sudah terlihat baik ataupun sebaliknya.

4. Pengorganisasian (*organizing*)

Pada tahap ini peserta didik mampu mengorganisasikan nilai-nilai pancasila sebuah sistem nilai yang diyakini oleh peserta didik sehingga dijadikan sebagai pedoman atau pandangan hidup. Tahap ini menjadi tahap yang juga

sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik dalam membentuk aspek afektif yang dimana peserta didik sudah mampu meyakini sistem nilai tersebut dalam kehidupannya, tidak lagi hanya sebatas materi yang dipelajari di dalam kelas.

5. Karakterisasi berdasarkan sistem nilai/ pembentukan pola hidup (*characterization by value or value-set*)

Pada tahap ini peserta didik mampu menghayati sistem nilai yang dibentuk dan disusunnya berdasarkan materi yang dipelajari sehingga menjadi pegangan nyata dan berlangsung secara terus menerus menjadi karakter peserta didik karena menjadi kebiasaan dan dibiasakan. Pada tahap ini akhirnya peserta didik mampu menjadikan nilai tersebut sebagai sebuah kebiasaan yang terwujud dalam sikap peserta didik. Sehingga proses penilaian aspek afektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebatas pada observasi sikap peserta didik setiap hari di dalam kelas tanpa adanya perencanaan yang matang. Domain afektif Krathwohl menunjukkan bahwa domain afektif memiliki keterkaitan dengan aspek kognitif dimana peserta didik memulai proses pembentukan aspek afektif dengan kemampuan menerima materi sampai dengan tahap karakterisasi berdasarkan sistem nilai sehingga menjadi nilai yang diyakini dalam kehidupannya.

KESIMPULAN

Capaian aspek afektif menurut taksonomi domain afektif Krathwohl ini dapat diterapkan oleh pendidik dimulai terlebih dahulu dengan memahami aspek afektif yang ingin dicapai dari masing-masing elemen, kedua yaitu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada capaian aspek kognitif tetapi juga aspek afektif, tahap ke tiga yaitu melakukan penilaian terhadap aspek afektif peserta didik berdasarkan capaian yang diharapkan bukan hanya mengamati sikap yang ditampilkan secara langsung oleh peserta didik di dalam kelas. Pendidik dapat merancang instrument penilaian aspek efektif menggunakan taksonomi domain afektif Krathwohl yang dimulai dari penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, pengorganisasian, dan karakteristik berdasarkan sistem nilai atau pembentukan pola hidup. Pendidik juga membutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran karena pendidik dalam kurikulum merdeka harus melaksanakan dua kegiatan belajar mengajar yaitu intrakurikuler dan kokurikuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, N., Sulastri, S., Syahril, S., & Febrianti, S. (2023). Penyusunan asesmen proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) pada kurikulum merdeka bagi guru sekolah dasar. *JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(3), 327–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/30033401000>
- Agustin, A., Suryono, H., & Yuliandari, E. (2017). TEKNIK PENILAIAN DIRI BERBASIS GOOGLE FORM PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 12(1), 482–491.
- Alanur, S. N., Jamaludin, & Amus, S. (2023). Analisis profil pelajar pancasila dalam buku teks pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 179–190.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5787>
- Amboro, K., Kuswono, K., Karsiwan, K., & Afwan, B. (2023). *Buku Panduan Pembelajaran Berbasis PjBL dan PBL dengan tema "Sejarah Lokal dan Cagar Budaya untuk Kurikulum Merdeka* (B. Afwan (ed.); 1 ed.). Laduny Alifatama.
- Anggraena, Y. dkk. (2020). *Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila* (1 ed., Vol. 1, Nomor 1). Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan: Kemendikbudristek.
- Arthur, J., & Cremin, H. (2012). *Debates in Citizenship Education*. Routledge.
- Astuti1, N. P. E., Margunayasa, I. G., Suarni, N. K., Wirawan, I. P. H., & Sulastra, P. (2024). Permasalahan Asesmen Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/cetta.v7i1.2954>
- Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Ilmu Ilmu Pengetahuan Sosial Fase D: Untuk Kelas VII – IX SMP/MTs/Program Paket B*. Kemendikbudristek.
- Karsiwan, K., Sari, L. R., Lisdiana, A., & Hamer, W. (2023). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di Lampung. *Journal of Social Science Education*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v4i1>
- Karsiwan, K., Wardani, W., Lisdiana, A., Purwasih, A., Hamer, W., & Retno Sari, L. (2023). Sosialisasi Materi Kearifan Lokal Dalam Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran IPS Bagi Guru di Kota Metro Lampung. *Malaqbiq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.46870/jam.v2i1.513>
- Kerr, D. (2002). 8. An international review of citizenship in the curriculum: the tea national case studies and the inca archive. In *International Perspectives on Education and Society* (Vol. 5). [https://doi.org/10.1016/s1479-3679\(02\)80011-1](https://doi.org/10.1016/s1479-3679(02)80011-1)
- Khoiriyarningsih, Prahara, Y. D., & Afriansyah, A. (2023). *Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dikeluarkan.
- Marniati, N. (2018). Implementasi Penilaian Afektif dalam Pembelajaran PPKn. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 111–119.
- Maslahah, W., Rofiah, L., & Makrifah, D. (2022). Pembelajaran IPS dalam Manifestasi Keterampilan Abad 21 di MTs Nurul Huda Bantur Malang. *ENVITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 69–182.
- Miles, M. G., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif* (The Third). Arizona State University.
- Ramadhani, N., & Shaleh. (2024). Penilaian Afektif Guru Pada Siswa Dalam Pembelajaran. *Awwaliyah: Jurnal PGMI Volume*, 7(2), 284–296.
- Ratnawati, D., & Karsiwan, K. (2024). Eksistensi Permainan Tradisional Tamtam Buku dalam Membentuk Keterampilan Sosial. *Journal, Aceh Anthropological*, 8(1), 80–96. <https://doi.org/10.29103/aaj.v8i1.15874>
- Riyanti, D., Purwantiningsih, A., & Manik, T. S. (2023). PENILAIAN AFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN PPKN TINGKAT SMA: PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI GURU. *Jurnal Civic Hukum*, 8(November), 137–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.26325>
- Samsuri, A. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK (PROJECT BASED LEARNING) PADA PELAJARAN IPS DIMASA PANDEMI (Studi Kasus). *Skripsi, April*, 1–80. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14851>

- Saputra, I. G. P. E., Sukariasih, L., & Muchlis, N. F. (2022). Penyusunan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Menggunakan Flip Pdf Profesional Bagi Guru SMA Negeri 1 Tirawuta: Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 5, 1941–1954.
- Setiawati, T., Setiawan, T., Prayogo, & Sapei, M. (2023). *Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dikeluarkan.
- Shodiq, S. F. (2021). Pengaruh Kepekaan Sosial terhadap Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5648–5659. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1698>
- Siadari, R. M. (2018). PKn Sebagai Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Untuk Anak Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2, 591–593.
- Suryatna, Y., Sumartini, A. T., Sari, D. P., & Ningrum, D. I. M. (2023). *Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VII*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dikeluarkan.
- Suyadi. (2004). Domain Afektif, Aspek Terlupakan dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Tarjih*, 7.
- Tusriyanto, T., & Karsiwan, K. (2021). Sepenggal Pemikiran John Dewey Tentang Demokrasi. *Social Pedagogy: Journal of Social Science*, 2(2), 204–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v3i1.4321>
- Veugelers, W. (2024). *Moral and Political Dimensions of Critical-Democratic Citizenship Education: Enhancing Social Justice , a Global Orientation , and Equity in Schools and Society*. Brill.
- Veugelers, W., & Samsusi. (2023). *Teori dan Praktik Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit Ombak.
- Widiyani, P. N., & Karsiwan, K. (2024). Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kepekaan Sosial Siswa pada Pembelajaran IPS Kelas VIII MTs Nurul Iman. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 8(2), 16–24.



Social Pedagogy: Journal of Social Science Education

Published by: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro

E-ISSN: 2722-7154

P-ISSN: 2722-7138

***Social Pedagogy : Journal Of Social Science Education* work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**